

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan studi pemahaman Ibnu Taimiyyah tentang terhadap hadis-hadis tentang kepemimpinan Quraisy, dapat ditarik kesimpulan yang merupakan eksplorasi jawaban pada rumusan masalah penelitian ini, yakni: Bagaimana metode pemahaman Ibnu Taimiyyah tentang hadis kepemimpinan Quraisy dan faktor-faktor yang melatar belakangi tipologi pemahamannya. Selengkapnya sebagai berikut:

1. Metode Pemahaman Ibnu Taimiyyah tentang Hadis-hadis Kepemimpinan Quraisy

Metode pemahaman Ibnu Taimiyyah tentang hadis-hadis kepemimpinan Quraisy mencerminkan dua metodologi sekaligus; Tekstual dan Kontekstual. Metode tekstual, penulis simpulkan sebagai tipologi pemahaman Ibnu Taimiyyah terhadap hadis-hadis kepemimpinan Quraisy yang terdapat dalam kitab *Minhāj as-Sunnah fī naqdi kalām asy-Syī'ah wa al-Qadariyyah*. Ia menerima apa adanya hadis kepemimpinan Quraisy sesuai dengan arti literalnya dan mengakui keberadaan kepemimpinan suku Quraisy, sebagaimana ia mengakui kepemimpinan di luar Quraisy. Namun yang berbeda disini adalah Penerimaan Ibnu Taimiyyah tentang kepemimpinan suku Quraisy tidak berarti menolak suku atau kelompok lain untuk menjadi pemimpin.

Metode kontekstual penulis simpulkan sebagai tipologi pemahaman Ibnu Taimiyyah terhadap makna yang tersirat dalam hadis-hadis kepemimpinan Quraisy, tidak leterletak sebagaimana arti bunyi bahasa teksnya, dikarenakan ada indikator kuat di balik teks tersebut sehingga perlu dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tersurat (tekstual). Ibnu Taimiyyah menyebutkan rukun yang wajib ada sebagai

kualifikasi kelayakan seorang pemimpin, yakni *al-Quwwah* dan *al-Amānah*. Dua kualifikasi ini selaras dengan tipologi Quraisy dalam arti kontekstual, yakni pemahaman Quraisy sebagai representasi sifat dari kekuatan dan sifat amanah yang dimiliki suku Quraisy pada masa itu. Sehingga dalam hal ini Ibnu Taimiyyah menerapkan metode kontekstual dalam tataran praksis. Artinya, dalam memilih seorang pemimpin, hal terpenting yang harus diperhatikan menurut Ibnu Taimiyyah adalah bukan dari suku atau golongan mana, tetapi dari sisi *al-Quwwah* dan *al-Amānah*-nya, sebagai mana tertuang dalam kitab *as-Siyāsah asy-Syar’iyyah fī Islāhi ar-Rā’ī wa ar-Ra’iyyah*.

Dualisme pemikiran ini menguatkan dugaan bahwa Ibnu Taimiyyah juga menggunakan metode kritik hadis dengan metode *muqaranah*, yakni membandingkan dengan dalil-dalil lain, baik bersumber dari al-Qur’an maupun hadis yang setema yang selanjutnya didialektikan dengan realitas politik yang ada saat itu, sehingga pada akhirnya pemikirannya atas hadis kepemimpinan Quraisy menjadi berbeda dan berkembang, yang dieksplorasi dalam kitabnya *as-Siyāsah asy-Syar’iyyah fī Islāhi ar-Rā’ī wa ar-Ra’iyyah*, yakni sebagai berikut:

Pertama, Bangunan politik berdasarkan syari’ah, dalam pandangan Ibnu Taimiyyah tidak mesti identik dengan penerapan al-Qur’an dan Hadis sebagai landasan formal dalam berpolitik dan bernegara. Namun penerapan syari’ah harus dimaknai bahwa kepemimpinan adalah sebuah amanat Tuhan yang harus dijaga untuk menjamin terlaksananya perintah agama. Hal ini meniscayakan hadis kepemimpinan Quraisy tidak serta merta diterima sebagai sesuatu yang *taken forgented*, sebagai syarat keharusan bagi seorang pemimpin.

Kedua, Quraisy sebagai salah satu kualifikasi prasyarat seorang pemimpin walaupun itu bisa diterima dalam kondisi tertentu, hal itu lebih kepada aplikasi kontekstual sebagai representasi sifat bukan dalam arti kelompok, suku maupun keturunan. Karena yang demikian akan bertentangan dengan semangat egaliterianisme yang ada di dalam al-

Qur'an dan hal ini tidak dibenarkan. Tidak pula hadis tersebut dijadikan sebagai pijakan dalil untuk melegitimasi kepentingan politik dan kekuasaan kelompok tertentu. Nampaknya itulah yang melatarbelakangi kritik Ibnu taimiyyah terhadap kelompok sunni dan syiah dalam memegang teguh dalil hadis kepemimpinan Quraisy pada masa itu.

Pandangan politik yang demikian itu merupakan salah satu bukti bahwa pemikiran Ibnu Taimiyyah berbeda dengan apa yang selama ini telah dikonsepsikan oleh sebagian umat Islam yang melihat sosok Ibnu Taimiyyah sebagai tokoh literalis dan konservatif dan dianggap tendensius yang sarat dengan kepentingan individu, sebagai penolakaannya terhadap *status quo* pemerintahan pada saat itu. Oleh karena persepsi awal yang muncul ini sudah keliru, maka pemahaman tentang hasil *ijtihad* Ibnu Taimiyyah ini menjadi sangat sempit dan sensitif, yakni dianggap sebatas gerakan yang melakukan perlawanan terhadap *status quo* pemerintah dan institusi ulama dengan menggunakan nalar pemikiran atas nama kemurnian Islam.

Dalam konteks ini, penulis berusaha melihat secara objektif pemikiran Ibnu Taimiyyah, khususnya terkait dengan pemahaman hadis kepemimpinan Quraisy dan implementasinya dalam regulasi persyaratan calon pemimpin. Dengan benar-benar membuka mata dan pikiran kita bahwa sesungguhnya tidak ada satupun yang berasal dari Nabi, baik ucapan, perbuatan, maupun *taqirir* (penetapan) yang "muspro" dan tidak berguna apa-apa ketika dihadapkan pada realitas ruang dan waktu yang berbeda. Semua akan tetap relevan dan sangat berarti bagi kehidupan kita.

2. Latar Belakang Pemahaman Ibnu Taimiyyah Tentang Hadis-hadis Kepemimpinan Quraisy

Di antara beberapa faktor yang melatar belakangi pemahaman Ibnu Taimiyyah dalam merespon hadis kepemimpinan Quraisy adalah; *Pertama*, Faktor Historis, bahwa Ibnu Taimiyyah adalah salah seorang pengikut Hanbali yang bercorak *salafisme* yang memiliki tipologi

tekstualisme dalam memahami teks-teks keagamaan dan memiliki doktrin madzhab yang radikal dengan menafikan segala sesuatu selain dari Islam, tentu faktor ini turut mempengaruhi pemikiran politiknya. Ia menjadi sosok pendobrak atau pembaharu yang cukup memiliki keberanian dan fatwa-fatwanya menjadi rujukan bagi beberapa kalangan umat Islam. *Alhasil*, meski ia terkesan bertolak belakang terhadap para pendahulunya yang senantiasa menyerukan untuk berlepas diri dari politik, namun upayanya untuk mengkampanyekan politik berbasis syar'i ini serasa membuka cakrawala baru dalam dunia pemikiran politik Islam.

Kedua, faktor sosial politik, realitas politik yang mengitari kehidupan Ibnu Taimiyyah memiliki pengaruh cukup signifikan bagi pemahaman Ibnu Taimiyyah dalam merespons hadis kepemimpinan Quraisy. Dalam lingkup lokal-regional, Ibnu Taimiyyah lahir di tengah kondisi yang carut marut, setelah beberapa tahun sebelumnya kekuatan Mongol, Khulaghu Khan, menghancurkan Baghdad. Khilafah hancur. Bahkan disebutkan, ketika Mongol menyerbu kota itu, ia dan keluarganya hijrah ke Damaskus. Selanjutnya, ia hidup di tengah-tengah perebutan kekuasaan antar dinasti, yakni dinasti Saljuk, Ayyubiyah, Mamluk, dan sampai pada masa kekuasaan dinasti Mongol. Kekuasaan Islam kemudian berhasil dibangun kembali di tangan Dinasti Mamluk, dinasti yang terbangun dari budak-budak dari Turki yang kemudian berhasil menghalau pasukan Mongol. Di masa inilah Sajar al-Durr menjadi ratu pertama di dalam pemerintahan Islam. Tetapi dinasti yang tidak terlalu kokoh ini kemudian dipenuhi dengan cerita kelam dan darah.

Disamping itu, dalam lingkup lebih luas, dunia islam juga sedang menghadapi ancaman eksternal dari tentara Salib. Sementara di Spanyol yang merupakan pusat peradaban islam di Barat, kekuatan islam semakin lemah digerogeti orang-orang kristen, untuk itulah Ibnu Taimiyyah mengusulkan adanya konsolidasi umat islam dan persiapan yang sempurna serta pertahanan yang kuat untuk menghadapi serangan-serangan musuh islam tersebut. Oleh karena itu perlawanan dan pemberontakan kepada

kepala negara akan semakin memperparah kondisi umat islam dan semakin melemahkan mereka, karena menimbulkan perpecahan di kalangan masyarakat muslim.

Hal ini tentu saja mempengaruhi pola pikirnya, karena sebagai pemikir yang realistis, di atas realitas politiklah ia merumuskan pemikirannya sebagai jawaban terhadap tantangan keadaan bahwa kekhalifahan harus di tangan Quraisy itu sudah tidak urgen, karena sudah relevan lagi digunakan pada kondisi dan iklim politik yang dihadapinya. Sehingga realitas politik inilah yang paling tidak memberi pengaruh cukup kuat bagi Ibnu Taimiyyah untuk tidak memaksakan pemberlakuan hadis kepemimpinan Quraisy secara tekstual.

Ketiga Ibnu Taimiyah menghargai akal, tetapi akal yang terbimbing oleh agama. Kekuasaan, menurutnya, adalah mandat dari Tuhan yang diberikan kepada hamba-hamba pilihanNya. Oleh karena itulah Ibnu Taimiyah berpendapat hukum harus ditegakkan dengan keras oleh negara, dan negara harus berjalan di atas keadilan hukum, sehingga perlu adanya ketentuan-ketentuan yang defenitif yang mengatur tugas dan ruang gerak masing-masing dalam wujud hukum yang berlaku secara objektif.

Ibnu Taimiyyah menolak pendapat Syi'ah dan Khawarij. Kelompok Syi'ah menganggap kepala negara yang ada waktu itu tidak memenuhi kualifikasi *ma'sūm* dan bukan dari kalangan *ahl al-Bait*, sebagaimana dalam teori *imamah* mereka. Sementara Khawarij, sejak peristiwa *tahkīm* antara Ali dan Mu'awiyah, merupakan kelompok sempalan yang anti pemerintah yang berkuasa. Syi'ah dan Khawarij adalah dua organisasi politik bawah tanah dan oposisi yang sering mengganggu stabilitas keamanan negara, dan merongrong pemerintah.

Di sini tampak gagasan organik Ibnu Taimiyah yang memandang hukum dan keadilan terintegrasi dalam pemerintahan. Inilah yang kemudian sering disebut kekuasaan memaksa dari *the rule* (pemerintah) terhadap *the ruled* (rakyat) yang diperlukan untuk menjaga masyarakat

terhindar dari keegoisan alamiah manusia yang dapat menghancurkan kehidupan sosial.

Setidaknya dari uraian mengenai Analisis hadis kepemimpinan Quraisy dalam pandangan Ibnu Taimiyyah ini memiliki beberapa signifikansi, diantaranya sebagai berikut:

Pertama; Dengan melakukan analisis interpretasi hadis-hadis kepemimpinan Quraisy dengan pendekatan studi tokoh akan terlihat hasil yang berbeda antara satu tokoh dengan yang lain, bahkan perbedaan juga muncul dalam diri seorang tokoh pada saat tertentu dan berbeda dalam kondisi yang lain. Pemahaman seperti ini akan melahirkan sikap toleran dan inklusif dalam menghadapi keragaman dengan tetap memposisikan diri kita antara tuntutan realitas di satu sisi dan kewajiban agama di sisi yang lain.

Pentingnya berpegang teguh pada nilai-nilai al-Qur'an dan Hadis untuk dijadikan pijakan dalam menghadapi pelbagai persoalan, meski dengan cara yang berdeda sesuai dengan situasi dan kondisi. Dalam konteks ini dapat diambil contoh Ibnu Taimiyyah yang mencoba melakukan rekonstruksi terhadap tradisi Islam pada saat itu, Ia tidak ingin umat Islam begitu saja menerima segala sesuatu tanpa disertai pembacaan kritis, terlebih lagi dalam menghadapi kompleksitas problem modernitas politik.

Kedua, Mengenai pentingnya *support system* dalam penegakan kepemimpinan, meliputi *al-Quwwah* (kekuatan, profesionalisme), *al-Amanah* dan kharisma serta pengaruh, juga perlunya *steak holder* dengan adanya ikatan solidaritas yang tinggi dalam hal kepemimpinan adalah cermin dari sebuah konsep pemerintahan yang ideal hasil analisis interpretasi hadis kepemimpinan Quraisy. Hal ini memiliki kontribusi yang positif bagi perkembangan politik selanjutnya, yakni mengedepankan azaz profesionalisme, menjunjung tinggi kualitas dan kapabilitas dalam memilih seorang pemimpin.

Ketiga, Selain itu, perlu penulis tegaskan disini bahwa beberapa poin-poin kesimpulan sebagaimana disebut di atas hanyalah hipotesa dari sebuah upaya pencarian yang masih panjang dan belum tuntas. Terdapat banyak kesempatan dan peluang untuk meninjau kembali hasil hipotesa ini di kemudian hari.

Dengan demikian, akan terjadi kritik-konstruktif dalam sebuah dialektika panjang keilmuan yang akan menambah khazanah pemikiran islam. Di sini penulis hanya bermaksud mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam pemikiran seorang tokoh dalam merspons sebuah teks agama ketika berhadapan dengan tradisi untuk pencerahan. Sebuah proyek yang mudah-mudahan mampu menjadikan generasi Islam tetap *survive* dalam konstelasi politik modern tanpa tercerabut dari akar ideologinya.

B. Saran-Saran

Pada bagian akhir penelitian ini, penulis ingin menyampaikan saran-saran:

1. Dari segi materi, kajian ini hanya fokus pada satu tema, yaitu tentang kepemimpinan Quraisy, padahal masih banyak teks-teks hadis yang perlu dikaji aspek normatifitas dan historisitasnya yang kemudian mengalami fluktuasi interpretasi oleh para tokoh dan ulama dalam bentuk pemaknaan dengan pendekatan, metode yang beragam serta berbeda-beda. Terlebih dalam penelitian ini hanya melibatkan satu pemikiran tokoh sebagai objek sentral pembahasan, tentu akan sangat berbeda dan kaya akan wacana manakala pembahasan diperluas ruang lingkupnya, atau diperbanyak kajian pemikiran tokohnya. Akan sangat signifikan kalau kajian materi (teks-teks) yang lain di luar ini diteliti oleh peneliti lainnya.
2. Dari segi metodologi, kajian ini hanya melakukan analisis isi dengan pendekatan studi tokoh yang dikorelasikan dengan realitas sejarah, sosial, dan politik yang melatarbelakanginya. Akan lebih baik kalau

ada yang berusaha melakukannya dengan pendekatan komparatif (perbandingan), atau dengan pendekatan hukum. Barangkali dengan pendekatan tersebut akan didapatkan informasi atau gagasan yang lebih komprehensif dari satu tatanan masyarakat yang selalu berinteraksi dengan teks-teks sebagai sumber pijakan dan sumber hukum.

3. Meskipun demikian, kajian ini tetap memiliki distingsi dari kajian-kajian setema yang telah ada, bukan merupakan kegiatan plagiasi yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, diharapkan kajian ini dapat memberi kontribusi baru dalam kajian hadis tematik kepemimpinan Quraisy dengan pendekatan studi tokoh, dapat memperkaya khazanah pemikiran, khususnya diskursus ilmu-ilmu hadis, serta dapat mengasah nalar kritis kita dalam merespons teks-teks agama.

C. Penutup

Sebagai ungkapan penutup, penulis mengakui banyaknya kekurangan dalam penelitian ini di berbagai aspek yang telah memberanikan diri –dengan segala keterbatasan- untuk menganalisis kembali metode pemahaman hadis Ibnu Taimiyyah dalam merespons hadis kepemimpinan Quraisy, namun setidaknya melalui karya sederhana ini ikut “meramaikan” khazanah pemikiran Islam, khususnya dalam kajian hadis-hadis politik.

Meskipun demikian, penelitian ini juga bisa disebut hasil *ijtihad* penulis yang sungguh-sungguh. Akhirnya dengan seraya memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah swt. penulis berharap karya ini bermanfaat. *Wallahu a'lamu bi as-Sawab.*